

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai bentuk perlawanan rakyat Urutsewu dalam konflik perebutan lahan. Temuan penelitian ini telah menjawab berbagai pertanyaan dan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya konflik dilatarbelakangi oleh perebutan sumber daya alam yang berkembang menjadi konflik kepentingan dengan melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah. Secara umum, rakyat Urutsewu tentu saja menolak atas klaim yang dilakukan TNI atas lahan mereka. Sehingga menimbulkan berbagai perlawanan yang tidak jarang disertai dengan bentrokan fisik berujung kekerasan.

Berbagai kekerasan yang dialami rakyat membuat mereka sadar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan secara terbuka dan memicu timbulnya bentrokan. Rakyat yang diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat dibantu LBH dan komunitas mengubah strategi perjuangan mereka, berbagai mediasi dan audisensi dilakukan guna memenangkan perjuangan. Pemerintah, KomnasHam, Ombudsman dan Presiden telah mereka temui guna mengadukan kasus penyerobotan lahan tersebut. Namun, sejauh ini berbagai perlawanan non fisik yang dilakukan rakyat pun lagi – lagi tidak ada tindak lanjut yang nyata dari pihak terkait. Konflik yang berkepanjangan membuat rakyat lelah sehingga mengambil langkah untuk mengurus kepentingannya masing – masing, rakyat menjadi terpecah belah antara yang pro TNI dan yang kontra. Namun pada dasarnya seluruh rakyat Urutsewu sangat menentang dan mengecam tindakan penyerobotan lahan yang dilakukan TNI. Sementara pemerintah tetap bersikap diam dan cenderung melakukan pembiaran, pemerintah memang tidak dapat bersikap tegas karena adanya indikasi bahwa dari awal memang

terlibat dengan berbagai kepentingan di Urutsewu. Namun, sejauh ini rakyat masih berharap bahwa pihak pemerintah mau menjadi penengah dan mendengar aspirasi rakyat Urutsewu.

Konflik yang berlangsung puluhan tahun menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, terdapat dua kubu antara yang pro dan kontra TNI, namun ada juga yang memilih diam dan mengurus kepentingan masing - masing. Berbagai kegiatan sosial dan budaya dilakukan bukan hanya semata – mata sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan TNI, namun fungsi utamanya adalah sebagai bagian dari konsolidasi horizontal di antara rakyat itu sendiri. Mempersatukan rakyat dengan diajak terlibat dalam kegiatan budaya dan keagamaan di wilayah tersebut. Karena bagaimanapun persatuan dan kesatuan tetap menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terlepas dari apapun perjuangan tanpa hasil yang selama ini dilakukan, masyarakat Urutsewu tetap harus hidup dengan harmonis.

## **5.2 Saran**

Berbagai temuan yang didapat selama melakukan wawancara dengan narasumber, para tokoh dan anggota LBH menyatakan banyak menemui hambatan yang berpengaruh terhadap pergerakan perjuangan Urutsewu. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengenai disintegrasi dan perpecahan di kalangan masyarakat antara yang pro dan kontra TNI. Perlu adanya konsolidasi antar warga dan membuka ruang dialog untuk menyamakan pikiran dan tujuan agar tidak melahirkan potensi konflik baru. Forum dialog dapat dilakukan secara berkala guna meningkatkan silaturahmi dan persatuan di kalangan warga, mengingat setiap perjuangan dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Latihan TNI perlu dilaksanakan dengan tujuan keamanan nasional, namun tetap perlu menjaga stabilitas internal masyarakat sekitar wilayah latihan tersebut. Sertifikasi TNI merupakan langkah yang dipaksakan yang akan merugikan

institusi TNI itu sendiri, jadi alangkah lebih baik jika TNI tidak memaksakan langkah tersebut terlebih jika memang langkah tersebut tidak didasari oleh motif bisnis.

3. TNI dinilai perlu melakukan konsolidasi dengan warga terkait berbagai konflik dan bentrokan yang telah terjadi puluhan tahun. Disamping menghentikan langkah memaksakan sertifikasi, langkah konsolidasi tersebut penting dilakukan demi menjaga martabat dan harga diri kesatuan di mata rakyat.
4. Terkait peran pemerintah, peneliti merekomendasikan berbagai kebijakan yang dapat diambil pemerintah diantaranya adalah menetapkan lahan konflik dengan status Quo, pemerintah bersikap tegas dan profesional dalam menyelesaikan konflik ini berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diakui bahwa peneliti memiliki berbagai keterbatasan.

1. Keterbatasan narasumber

Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak mendapatkan akses ke pihak TNI, pemerintah Kabupaten Kebumen dan BPN. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperoleh informasi dari beberapa pihak tersebut agar hasil penelitian lebih objektif.

2. Penelitian lebih dalam

Penelitian ini fokus pada bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Urutsewu dalam mempertahankan hak kepemilikan lahan. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dari sudut pandang yang lebih luas sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih beragam.

3. Sejauh ini berbagai penelitian terkait konflik Urutsewu masih dilakukan dari sudut pandang pihak rakyat, untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk melakukan kajian lebih dalam terkait konflik Urutsewu dari sudut pandang pihak TNI atau pihak terkait lainnya.